

***RATIO DECIDENDI* ANTOLOGI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN *PRESIDENTIAL*
*THRESHOLD***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Abu Rizal Fadli

02040421002

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Abu Rizal Fadli

NIM : 02040421002

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Januari 2023

Saya yang menyatakan



(Abu Rizal Fadli)

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

NAMA : Abu Rizal Fadli
NIM : 02040421002
PRODI : Magister Hukum Tata Negara
JUDUL : *Ratio Decidendi* Antologi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian
Presidential Threshold

Tesis ini telah di periksa dan di setujui untuk di ujikan.

Surabaya, 04 Januari 2023

Pembimbing 1



Dr. Muwahid, S.H, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Pembimbing 2



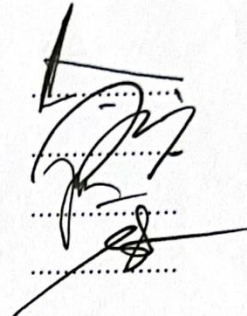
Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
NIP.197208062014112001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul "*Ratio Decidendi* Antologi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian *Presidential Threshold*" yang ditulis oleh Abu Rizal Fadli NIM. 02040421002 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 11 Januari 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Penguji : Dr. Muwahid, S.H, M.Hum
2. Sekretaris Penguji : Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
3. Penguji 1 : Dr. Priyo Handoko S.S, S.H., M.Hum
4. Penguji 2 : Dr. Khoirul Yahya, M.Si

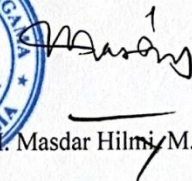


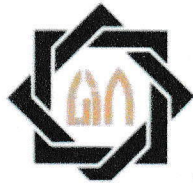
Surabaya, 11 Januari 2023

Direktur,



Prof. Dr. Masdar Hilmi, M.Ag. Ph.D





UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abu Rizal Fadli
NIM : 02040421002
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : aburizalfadlihtn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

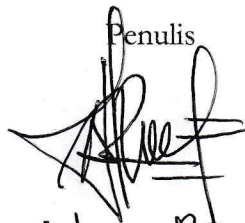
Ratio Decidendi: Antologi putusan Mahkamah Konstitusi
dalam pengujian Presidential Threshold

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02/Oktober/2025

Penulis

(Abu Rizal Fadli)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil kajian hukum normatif yang mengkaji serta menganalisis *Ratio Decidendi* Antologi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian *Presidential Threshold* dengan menggunakan pendekatan *statue approach* dan *case approach*, yang penulis batasi menjadi dua rumusan masalah: pertama bagaimana politik hukum *presidential threshold* di Indonesia, dan kedua bagaimana analisis *ratio decidendi* antologi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian *presidential threshold* di Indonesia. Antologi putusan tersebut meliputi Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018, Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022.

Data penelitian tesis ini dikumpulkan melalui teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum tersebut bersumber dari perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki relevansi. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil kesimpulan singkat penulis: pertama politik hukum pengaturan *presidential threshold* di Indonesia sesungguhnya untuk membidik penyederhanaan sistem kepartaian dan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang stabil dan efisien. Kedua, *ratio decidendi* antologi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian *presidential threshold* selalu menegaskan tiga aspek yaitu, penegasan terhadap sistem presidensial, penyederhanaan partai politik dan *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketiga aspek yang selalu menjadi alasan yuridis majelis hakim menolak seluruh permohonan pengujian *presidential threshold* tersebut menurut penulis tidak tepat. Sebab memberlakukan *presidential threshold* sebagai bentuk penegasan terhadap sistem presidensial dengan bergantung pada hasil pemilihan legislatif sebelumnya justru merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Kemudian, membiarkan keberadaan *presidential threshold* untuk menyederhanakan jumlah partai politik tidak dapat dibenarkan, sebab tidak berkeadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu juga dengan Mahkamah yang selalu menegaskan bahwa ketentuan *presidential threshold* merupakan *open legal policy* menciderai eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*. Dengan demikian pemberlakuan *presidential threshold* di Indonesia harus ditiadakan, sebab tidak memiliki relevansi, esensi dan substansi sama sekali.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Antologi, *Presidential Threshold*

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

ABSTRACT

This thesis is the result of a normative legal study that examines and analyzes the Ratio Decidendi in the Anthology of Constitutional Court Decisions in Testing the Presidential Threshold by using the statute approach and the case approach, which the authors limit to are two problem formulations: first how is the political law of the presidential threshold in Indonesia, and second is how the ratio decidendi analysis of the anthology of Constitutional Court decisions in testing the presidential threshold in Indonesia. The anthology of decisions includes Decision Number 53/PUU-XV/2017, Decision Number 49/PUU-XVI/2018, Decision Number 54/PUU-XVI/2018, Decision Number 52/PUU-XX/2022, and Decision Number 73/PUU-XX/2022.

The research data for this thesis were collected through technical literature studies taken from representative sources of legal materials, the legal materials were sourced from applicable laws including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UDN NRI) and Law Number 7 Year 2017 concerning Elections. As well as decisions of the Constitutional Court that have relevance. The collected legal materials were then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the authors' brief conclusions: first, the legal politics of setting the presidential threshold in Indonesia are actually aiming at simplification of the party system and to strengthen a stable and efficient presidential system of government. Second, the anthology ratio decidendi of the Constitutional Court Decisions in testing the presidential threshold always emphasizes three aspects, namely, the affirmation of the presidential system, the simplification of political parties and the presidential threshold as an open legal policy. According to the author, the three aspects which have always been the juridical reason for the panel of judges rejecting all applications for testing the presidential threshold are inappropriate. Because applying the presidential threshold is a form of affirmation of the presidential system by depending on the results of the previous legislative elections is the logic in filling the position of the holder of the highest executive power in a parliamentary system. Then, allowing the existence of the presidential threshold to simplify the number of political parties cannot be justified, because it is unfair and contrary to the Constitution. Likewise with the Court which has always emphasized that the provision on the presidential threshold is an open legal policy that harms the existence of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. Thus the application of the presidential threshold in Indonesia must be abolished because it has no relevance, essence and substance at all.

Keywords: Ratio Decidendi, Anthology, Presidential Threshold

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

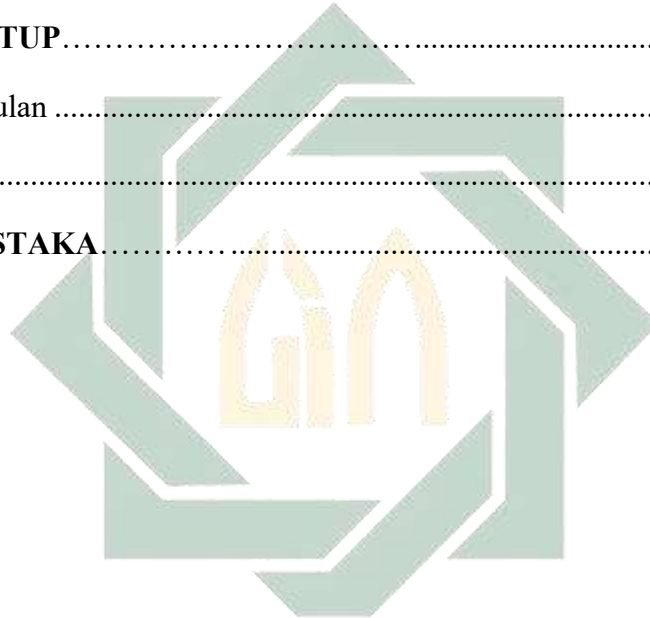
DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN PLAGIASI.....	vi
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xivv
DAFTAR TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Masalah.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Kerangka Teoritik	15
G. Penelitian Terdahulu.....	18
H. Metode Penelitian	25
I. Sitematika Pembahasan.....	30
BAB II KAJIAN TEORI.....	32
A. Teori Demokrasi.....	32

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

1. Negara dan Kedaulatan Rakyat	32
2. Konsep Demokrasi	34
B. <i>Presidential System</i>	42
1. Sistem Pemerintahan Presidensial	42
2. <i>Trias Politica</i> Sebagai Dasar Sistem Pemerintahan Presidensial.....	45
3. Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai	48
C. Konsep <i>Presidential Threshold</i>	52
BAB III POLITIK HUKUM <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DI	
INDONESIA	57
A. Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia	57
B. Politik Hukum <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia.....	65
C. Karakteristik Hukum Pengaturan <i>Presidential Threshold</i>	72
BAB IV <i>RATIO DECIDENDI</i> ANTOLOGI PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>	76
A. <i>Epistemologi Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Pengadilan	76
B. <i>Ratio Decidendi</i> Antologi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian	
<i>Presidential Threshold</i>	80
1. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017	80
2. Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018	86
3. Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018	90
4. Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022.....	93
5. Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022.....	97
C. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Antologi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam	
Pengujian <i>Presidential Threshold</i>	100
1. Penguatan Terhadap Sistem Presidensial	104
2. Penyederhanaan Partai Politik.....	110

3. <i>Presidential Threshold</i> sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (<i>Open Legal Policy</i>).....	118
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A.R, Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Abra, Emy Hajar. "Ketidakadilan *Presidential Treshold* Dalam Konstitusi Indonesia". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi V*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021).
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Anangkota, Mauliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian". *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2 (2018).
- Anggara, Vanni. "Dinamika *Presidential threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Transformative*, Vol. 5, No. 2 (September 2019).
- Aritonang, Dinoroy Marga. "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945". *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2 (Juni 2010).
- Armia, Muhammad Siddiq. "Penghapusan *Presidential threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional". *Petita*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2016).
- Arsil, Fitra. "Pemilu Serentak Tetap Punya Masalah" (Tesis--Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014).
- Ashiddiqie, Jimly. *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidential*. Jember: Universitas Jember, 2011.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana, Ilmu Populer, 2007.
- . *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bahana Ilmu Populer, 2007.
- <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

------. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Beetham, David & Kevin Boyle. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Broker, Paul. *Non-Democratic Regimes, Theory: Government & Politics*. Hampshire: Macmillon Press, 2000.

Djuyandi, Yusa. "Koalisi Partai Politik Untuk Demokrasi: Membangun Demokrasi Kebangsaan dalam Nuansa Pluralisme". *Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (2011).

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

Ekatjahjana, Widodo. "Mencermati *Ratio decidendi* MK dalam Putusan Nomor 122/PUU-VI/2009 tentang Penderogasian Norma Hukum dan Sifat Putusan PTUN". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010).

Ermansyah, Edho Rizky. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017: Sebuah Perjalanan Menjadi Peserta Pemilu 2019". *Jurnal Indonesian State Law Review*, Vol. 3 No. 1, (Oktober, 2020).

Evangelista, Beverly. "Eksistensi Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut UUD 1945". *Jurnal Ius*, Vol. 2, No. 5 (2014).

Fachrudin, Fachri. "*Presidential threshold* di UU Pemilu Kembali Dipertanyakan,"
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/21/1206061/presidential-threshold-di-uu-pemilu-kembali-dipertanyakan>; diakses tanggal 03 September 2022.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Fakultas Hukum Universitas Kajuruhan Malang. *Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2018.

Farida, Anis. "Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan". *al-Qanun*, Vol. 24, No. 1 (Juni 2021).

Fatah, Eef Saefullah. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Fitra, Ade Fadillah. "Analisis Yuridis Ketentuan *Presidential threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan

- Umum Presiden dan Wakil Presiden”. *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2017).
- Ghafur, Jamaludin dan Allan Fatchan Gani Wardhana. *Presidential threshold*. Malang: Setara Press, 2019.
- , *Presidential threshold: Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum, di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Ghofur, Abdul. “Problematika *Presidential threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3 (2018).
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso. “Analisis Yuridis *Presidential threshold* Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019” (Tesis--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017).
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso. “Analisis Yuridis *Presidential threshold* dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019” (Tesis--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017).
- H.F, Abraham Amos. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsi-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hanan, Djayadi. *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Al-Mizan, 2014.
- Handoko, Priyo dan Anis Farida. “Menghujat Presiden: Antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan *Hate Speech* Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh”. *Jurnal Indonesia Maju*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2021).
- Hendra Poltak Tafonao Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, Afnila. “Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUUXV/2017”. *USU Law Journal*, Vol.7. No.6, (Desember, 2019).
- Hernanda, Rezi. “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun
- <http://digmb.uinsd.ac.id/> <http://digmb.uinsd.ac.id/> <http://digmb.uinsd.ac.id/>

2017 Tentang Pemilihan Umum” (Skripsi--Universitas Islam, Riau. 2020).

Hidayatullah, Faisal Hananto Widodo, dan Hezron Sabar Rotua. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materi *Presidential threshold* Dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019”. *Jurnal Novum*, Vol. 05 No. 02 (April, 2018).

Hidayatullah, Faisal. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NNomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materi *Presidential threshold* dalam Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019”. *Jurnal Novum*, Vol. 5, No. 2 (April 2018).

Internal IDEA. *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Stocholm: Bulls Tryekeri, 2002.

Isra, Saldi. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014.

------. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

J.A, Denny. *Partai Politikpun Berguguran: Kumpulan Tulisan Republika*. Yogyakarta: LKIA, 2006.

Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru, 1985.

Kartawidjaja, Pipit R. *Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (kumpulan paper)*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016.

Kementerian Dalam Negeri. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretarian Kementerian Dalam Negeri, 2016.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. *Hasil Strategik Planning Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konsorium Reformasi Hukum Nasional, 2003.

Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Lilphart, Arend. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Macridis, Roy C. *Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes*. Toronto: Little, Brown and Vompny, 1983.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "10 Undang-Undang Yang Sering Diuji," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4>, diakses tanggal 03 September 2022.

Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2015.

MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 1999.

------. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: LP3ES, 2007.

Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum". *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3 (Juli 2009).

Negretto, Gabriel L. *Minority Presidents and Democratic Performance in Latin America*. *Latin America Politics and Society*, Vol. 48, No. 3 (2006).

Overton, Spencer. *Political Law*. *The George Washington Law Review*, Vol. 81, No. 6 (November 2013).

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009.

Prihatmoko, Joko J. *Mendemokrasikan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Praktis*. Yogyakarta: Pusat Belajar, 2008.

Raditya, I Gusti Ngurah Agung Sayoga. "Pengaturan Ambang Batas Formal (*Formal Threshold*) dalam Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia" (Tesis--Progam Pascasarjana Universitas Udayana, 2013).

------. *Rethinking Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Denpasar: Universitas Udaya, 2013.

Rapar, Jean Hendrik. *Pengantar Logika: Asas-Asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Reinanda, Raden Viola. "Penafsiran Open Legal Policy: Sudi Terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia" (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018).

Romli, Lili. *Sistem Presidensial Indonesia: Dinamika, Problematik, dan Penguatan Pelembagaan*. Malang: Setara Press, 2019.

Sahdan, Gregorius. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Pondok Edukasi,

Saputra, Berry Ballen. "Ratio Decidendi Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana). *Open Jurnal*, Vol.2, No. 4 (2018).

Sodikin. "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(dan Penguatan Sistem Presidensial". *Jurnal Rechtvinding BPHN*, Vo. 4, No. 1 (2014).

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Alsara Baru, 1985.

Supriyanto, Didik dan Augus Mellaz. *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliemetary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2011.

Supriyanto, Didik. *Threshold dalam Wacana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Thanos, Christopher Joshua Lefrandt, Donald A. Rumokoy, Audi H. Pondaag. "Tinjauan Yuridis Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 3 (Juli-September, 2020).

Thompson, Dennis. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

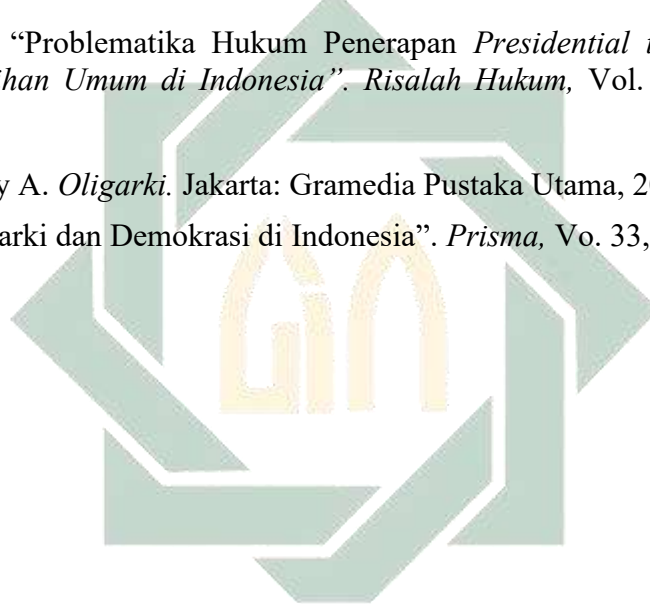
Tim Penulis Kerja Untuk Rakyat. *Buku Panduan Anggota Legislatif*. Depok: Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik UI, 2009).

Wibowo, Mardian. *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Wijaya, Asep. "Problematisa Hukum Penerapan *Presidential threshold* dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 1 (Juni 2020).

Winters, Jeffrey A. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

-----, "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia". *Prisma*, Vo. 33, No. 1 (2014).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A